



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SRIWIJAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MISNANIARTI
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 99945

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.686.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 312 m2/135 m2 di KAB / KOTA OGAN ILIR, HASIL SENDIRI Rp. 770.000.000
2. Tanah Seluas 8081 m2 di KAB / KOTA LAHAT, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
3. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA OGAN ILIR, WARISAN Rp. 56.000.000
4. Tanah Seluas 750 m2 di KAB / KOTA OGAN ILIR, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
5. Tanah Seluas 749 m2 di KAB / KOTA OGAN ILIR, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
6. Tanah Seluas 319 m2 di KAB / KOTA KOTA PRABUMULIH , HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/36 m2 di KAB / KOTA OGAN ILIR, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 241.000.000

1. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA 1.3 G-MT / MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
2. MOTOR, HONDA NF125TR MT / SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOTOR, HONDA D1802N12L2 / SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000



4. MOBIL, TOYOTA AGYA 1.0 G-AT/MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000

5. MOTOR, YAMAHA NMAX B6H A/T / SOLO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 152.950.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 486.212.880

F. HARTA LAINNYA Rp. 361.879.000

Sub Total Rp. 2.928.041.880

III. HUTANG Rp. 83.705.457

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.844.336.423

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.